

Jila esensi demokrasi pada tingkay individual ini bisa mengalami proses internalisasi pada setiap aktor dan komunitas politik, maka upaya-upaya penegakan demokrasi pada arus struktural maupun kultural akan lebih menemukan persemaian subur demokrasi yang menjanjikan. Sudah siapkah kita semua ke arah itu ? *Wallahu ‘alam bishawab.*”

DAFTAR PUSATAKA

- Almond-Verba, 1963, *The Civic Culture*, Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Apter, David, 1990, *The Politics of Modernization*, Chicago, University of Chicago Press.
- Bulkin, Farhan, *Politik Orde Baru*, Prisma, Vol.8, 1984
- Feith, Herbert, 1971, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca, Cornell University Press.
- Geertz, Clifford, 1980, *Negara dan Penjaja*, Jakarta, PT.Gramedia
- Gould, Charles, 1998, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Jakarta, PT.Gramedia
- Pudjo Suharso, 2000, “Quo Vadis Demokrasi Indonesia” dalam Mahfud MD, *Wacana Politik, Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta,LkiS.
- Pudjo Suharso, 2002, *Perilaku Elit Politik Berkeadaban*, Makalah, Tidak diterbitkan.
- Przeworski, 1991, *The Democracy and Organization of Political Parties*, London, McMillian.

SELESAI SAMPAI DI SINI

mendorong rasa senang, enjoy, dan antusias, dapat berubah menjadi teror politik yang menakutkan sekaligus menciptakan phobia politik masyarakat.

Kemudian pada aras budaya politik pula diperlukan upaya membangun otonomi masyarakat. Bagaimana agar masyarakat, baik elite maupun awam menunjukkan mentalitas yang mandiri sebagaimana dikenal dalam *civil society* adalah agenda mendesak yang perlu dipikirkan.

Jika demokrasi juga mencakup sikap budaya dan tidak sekedar tatanan politik yang hanya diimplementasikan dalam teks-teks politik, maka pemberdayaan berpolitik menjadi salah satu prasyarat penting pula dalam membangun demokrasi. Dengan kata lain, untuk memasuki iklim demokrasi yang benar dan baik perlu pendewasaan. Sebab untuk mendirikan (sistem) demokrasi bukan hanya perlu kebebasan berserikat. Bukan hanya kualitas pers yang bebas, tetapi juga kualitas ketanggapan pembacanya. Bukan hanya kebebasan mimbar atau kebebasan berbicara semata, tapi juga kedewasaan pembicaraannya. Dan hanya menuntut kualitas legislatif yang bisa menyuarakan hati nurani rakyat, tetapi juga menuntut kualitas eksekutif agar bisa menangkap suara hati nurani rakyat. Tanpa pemahaman dan kedewasaan, demokrasi akan berubah menjadi *demo-crazy* dan hanya akan membingungkan rakyat sebagaimana dilukiskan Pudjo Suharso dalam sajaknya seperti yang saya kutip pada awal tulisan ini.

Last but not least, dibalik semua perdebatan teoretik tentang demokrasi, juga dibalik semua tuntunan serentak bagi demokratisasi negeri ini yang datang dari segenap penjuru, tampaknya tak cukup tersedia ruang luas bagi suatu kesadaran mendasar bahwa demokrasi sebenarnya adalah sebuah proses yang seharusnya berjalan sejak tingkat individual, dan bukan semata-mata sebuah proses besar kelembagaan yang kasat mata.

Barangkali tak banyak yang sadar betul bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang bermula dari tingkat individual. Sebuah semboyan paten seseorang demokrat adalah “*aku mungkin tak setuju dengan pendapatmu, tapi aku akan mati-matian berjuang agar kau bisa menyuarakan pendapat itu*”. Celaknya semboyan inilah yang tak pernah bisa hadir dalam masyarakat kita.

mengartikulasikannya. Sayangnya perilaku politik para tokoh dan elit politik saat ini nampaknya masih jauh dari apa yang dijelaskan oleh Gould. Terlalu sulit untuk menemukan elit politik yang mempunyaai moralitas dan etika politik yang mencerminkan kesantunan, kejujuran, keadilan dan toleran dalam kehidupan politik sehari-hari.

Oleh karena itu dalam menyongsong Pilkada langsung 2005 tidak kalah pentingnya para tokoh dan elit politik sangat perlu memperbaiki perilaku politik ditingkat kebudayaan politik dan perilaku demokratis. Pada tingkat budaya politik perlu dibangun *civic culture* dimana *the citizen is called on to persue contradiktore; he must be actife, yet passife infolfed, yet both too infolfed, influential yet differential* (Almond-Ferba, 1963). Budaya politik seperti ini akan dapat membuat dan mendorong terbangunnya etika dan moralitas politik yang santun, toleran dan berkeadaban.

Mengingat corak sosiologis masyarakat kita yang masih kental diwarnai paternalistic, dalam implementasi perilaku santun, toleran, jujur, dan berkeadaban dari para elit dan tokoh politik akan dapat dilihat dari terbangunnya apa yang disebut Pudjo Suharso (2000) sebagai komunitas politik sebagai *followership* yang mempunyai karakter kesediaan untuk bekerjasama dan kemampuan untuk mengendalikan egonya serta *politicall efficacy* dengan corak komunitas politik yang aktif, partisipatif, kritis, terbuka, toleran dan tetap patuh pada aturan main.

Tanpa *followership*, suasana bebas dalam demokrasi cuma sekedar jadi ajang bebas saling menjatuhkan dan bebas saling menjegal, gontok-gontokan. Kebebasan dalam demokrasi lalu diartikan sebagai bebas untuk terus-menerus berebut kursi kekuasaan.

Jika konfigurasi perilaku elit dan tokoh politik mampu mewujudkan tuntutan di atas sekaligus dapat menciptakan *public opinion* yang positif bahwa dalam perebutan *the allocation of authoritative value* dilakukan di atas prinsip etika dan moralitas politik demokratik, kita dapat lebih tenang dalam menyongsong kehadiran Pilkada langsung 2005. Sebaliknya jika gagal, sangat mungkin masyarakat akan mengalami ketakutan, kecemasan dan was-was politik. Pilkada langsung yang dianggap sebagai pesta demokrasi di mana seharusnya dapat

Kelima, problem yang diidap KPU dan KPUD ini telah memberikan implikasi terhadap berbagai persoalan strategis yang seharusnya dilakukan KPU dan KPUD. Soal yudicial review UU No.32/2004 misalnya. Di satu sisi KPU minta agar ada revisi pada UU tersebut, di sisi lain KPUD mengatakan bahwa tidak perlu ada peninjauan ulang. Konflik antara KPU dengan KPUD di satu sisi dan di sisi lain dengan pemerintah telah membuat kebingungan sebagian besar masyarakat yang kurang paham terhadap tidak saja aturan main tetapi juga system pemilu itu sendiri. Jikalau kebingungan massal ini terus berlanjut, dapat diperkirakan hal ini akan menjadi *trigger* atau amunisi bagi kekuatan politik lama untuk “mengejek” ketidakbecusan pemerintahan baru di dalam mengurus pesta demokrasi ini.

Membangun Demokrasi: Perilaku Politik Berkeadaban.

Membangun institusi-institusi demokratik adalah prasyarat penting bagi peletakan system politik demokratis. Demikian pula kehadiran Pilkada langsung yang akan dimulai Juni 2005 mendatang, merupakan proses politik strategis menuju kehidupan politik demokratis.

Namun di atas semua itu yang tak kalah penting adalah upaya kita sampai benar-benar berhasil membangun etika dan moralitas politik baru khususnya bagi para elit dan tokoh politik yang sebangun dengan tuntutan system politik demokratik. Prasyarat penting yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan itu adalah pentingnya dibangun kebudayaan dan kepribadian politik demokratik yang menurut **Gould (1998)** meliputi elemen-elemen: inisiatif rasional politik, kesantunan politik, disposisi resiprositas toleransi, fleksibilitas dan *open mindedness*, komitmen kejujuran dan akhirnya keterbukaan. Didalam ungkapan berbeda akan tetapi memiliki substansi yang sama, upaya yang dimaksud hanya mungkin dimenangkan diatas keberhasilan kita didalam membangun etika dan moralitas politik yang berkeadaban demokratik , untuk menyebut kesantunan, keadilan, toleransi sebagai elemen penting etika dan moralitas politik.

Di hadapan konteks sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat kental paternalistik dan feodalisme, yang pertama-tama dan terutama untuk mewujudkan semua tuntutan di atas adalah menjadi tugas bagi para elit dan tokoh politik untuk

kelemahan UU Pemda tersebut bisa jadi akan mendorong kembali munculnya “otoritarian” partai politik yang begitu *powerfull* di dalam rekrutmen calon pejabat publik (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Kemungkinan adagium politik yang biasa didengar “membeli kucing dalam karung” akan sangat terbuka terjadi. .

Kedua, kehadiran UU No.32 tentang Pemda tahun 2004 di satu sisi telah memberikan peluang baru bagi proses demokratisasi, khususnya di tingkat politik lokal, tetapi di sisi lain juga mengundang banyak masalah dengan banyaknya persoalan gramatikal perumusan berbagai pasal. Misalnya dalam pasal yang menunjukkan pada persoalan persyaratan. Perumusan pasal tersebut mempunyai kesalahan gramatikal yang menyebabkan tidak mempunyai makna yang jelas.

Ketiga, polarisasi antar kekuatan politik yang berbasis aliran ataupun kekuatan politik yang pro reformasi dan yang status quo begitu memberikan peluang bagi berkembangnya *political split* yang berimplikasi pada aras sosiologis di mana konflik horizontal akan bersemai di dalamnya. Kekawatiran kembalinya kekuatan politik model rezim Orba yang hegemonic di satu sisi dan di sisi lain adanya was-was politik dengan menggeliatnya Partai Golkar dengan dengan derivasinya yang dapat dibaca sebagai representasi kekuatan politik Orba menjadikan kebimbangan bagi para analisis politik sekaligus warning bahwa Pilkada langsung yang dimulai Juni 2005 nanti merupakan “*turning point*” yang sebenarnya, apakah kita akan ke arah politik demokrasi atau kembali pada otoritarianisme.

Keempat, disamping persoalan konseptual yang berkaitan dengan KPU, KPUD, lembaga ini juga tengah dihadapkan tidak saja persoalan teknis operasional, tetapi juga tengah ditantang dengan berbagai upaya untuk melakukan “*deligitimasi*” politik baik pada tingkat institusional maupun kapabilitas individual. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan dukungan financial di berbagai Pemerintah Kabupaten/Kota setidaknya telah membuat KPUD di berbagai daerah kedodoran. Selain itu keberadaan KPUD yang berkesan sebagai pelaksana teknis pemilu dari KPU Pusat di banyak daerah terkesan “kebingungan” dan seringkali menjadi “*bumper*” dari *political fallacy* yang dilakukan KPU Pusat.

demokratik untuk membangun lembaga-lembaga demokrasi, juga karena ketiadaan dan makin tipisnya etika serta kesantunan politik yang dipertontonkan oleh elit-elit politik dalam melakukan kompetisi politik untuk memperjuangkan kepentingan politik masing-masing.

Dalam kondisi masa transisi yang demikian muncul keyakinan public bahwa satu kesalahan sangat serius telah terjadi di dalam pemerintahan dan masyarakat kita; bahwa semakin banyak elit dan tokoh politik bertindak hanya bagi kepentingan pribadi mereka sendiri, bukan bagi kepentingan rakyat yang mereka wakili. Meminjam ungkapan Nisbet, yang terjadi semakin transparan di hadapan mata public bahwa “seni memerintah” (*the art of governing*) semakin berkembang menjadi “seni untuk menipu” (*the art of deceiving*) rakyat di dalam skala yang makin besar. Inilah situasi dan realitas politik yang tengah kita hadapi saat ini, suatu realitas yang bukan tidak mungkin akan mendorong terciptanya alienasi politik masyarakat dan kehidupan politik yang meliar; situasi yang sangat subur bagi persemaian anarkhi dan kekerasan politik apabila para elit dan tokoh politik gagal memenejanya.

Riding The Tiger

Dihadapkan dengan fenomena dinamika dan realitas politik sebagaimana digambarkan di atas, kehadiran Pilkada langsung Juni 2005 menjadi menarik untuk dicermati. Bukan tidak mungkin kehadiran Pilkada 2005 secara langsung yang akan memilih sekitar 176 Bupati dan Walikota se Indonesia mengibaratkan kita semua sedang berada dalam kondisi “*Riding the tiger*”. Situasi di mana kita dihadapkan pada kondisi yang problematic, jikalau Pilkada langsung gagal menciptakan konsolidasi demokrasi, kekhawatiran kembalinya otoritarianisme akan terbuka lebar dan sebaliknya jika pun berhasil dilaksanakan optimisme akan terciptanya konsolidasi demokrasi masih diragukan.

Beberapa hal yang menyertai kita seakan dalam kondisi “*riding the tiger*” adalah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kehadiran landasan yuridis berupa UU Pemerintah Daerah No.32/2004 sebagai revisi UU No.22/1999 masih menyisakan problematic di mana aturan organic dan pasal-pasal yang ada tidak memberikan jaminan bagi berlangsungnya pilkada yang jurdil dan luber. Berbagai

penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan secara kolektif, baik dalam aras politik maupun ekonomi.

Dalam masa transisi ini pula kita saksikan konflik-konflik yang “inherent” terjadi secara bersamaan di dua “front” sekaligus : Di front pertama antara “opponents” dan “defenders” dari kekuatan otoritarian, dan pada front kedua antara kekuatan-kekuatan proto demokratik satu sama lain untuk merebutkan posisi terbaik dalam kompetisi memperoleh *the allocation of authoritative value* di bawah sistem demokrasi.

Padahal sebagaimana dikatakan oleh Przeworski (1991) konsolidasi demokrasi idealnya terjadi ketika konflik yang terjadi pada front yang pertama telah berhasil membangun kelembagaan demokrasi sebagai satu-satunya landasan atau arena bagi konflik politik yang terjadi pada front yang kedua, ketika tidak ada satu actor politik pun yang memiliki kesempatan untuk bertindak di luar institusi-institusi demokrasi, dan ketika satu-satunya tindakan yang akan diambil oleh semua kekuatan yang menderita kekalahan di dalam kompetisi politik adalah menyiapkan diri untuk memperoleh kemenangan di dalam putaran persaingan politik yang akan datang.

“Democracy is consolidated when under given political and economic conditions a particular system of institutions becomes the only game in town, when no one can imagine acting outside the democratic institutions, when all the loser want to do is to try again within the same institutions under which they have lost”(Przeworski, 1991).

Adalah kegagalan untuk membangun instusi-instusi yang diperlukan sebagai landasan dari suatu proses transisi demokrasi yang demikian itulah yang telah menjadi sumber dari carut marut kehidupan politik nasional saat ini, ketika persaingan politik yang sangat keras diantara kekuatan-kekuatan proto demokratik dan elit-elit politik dilakukan secara *all out* tanpa landasan etika dan kesantunan politik yang kuat, sehingga perilaku para elit politik khususnya mengaburkan batas-batas wilayah konflik antara kekuatan-kekuatan proto demokratik dan kekuatan-kekuatan pro status quo di front yang pertama, dan wilayah konflik antara kekuatan-kekuatan proto demokratik satu sama lain di front kedua. Sumbernya selain berada di dalam ketidakmampuan kekuatan-kekuatan proto

tentang tiga hal yang sangat penting, yakni : 1. dinamika proses politik yang terjadi menyusul jatuhnya Soeharto; 2, Konfigurasi konflik politik diantara berbagai kekuatan politik yang dihasilkan oleh praktik politik Orba dan 3, berkembangnya kebudayaan masyarakat sebagai produk aplikasi ideology pembangunanisme yang mencuatkan sikap apolitik, permisif, ekspresif dan hedonistic.

Setelah kita melewati pemilu 1999 yang oleh sebagian besar masyarakat tidak saja nasional tetapi juga internasional diakui sebagai pemilu yang paling demokratis, sebagian besar dari kita seakan berkembang *rising expectation* bahwa di negeri kita akan segera terbangun konsolidasi demokrasi yang kemudian disusul system kepolitikan yang benar-benar demokratis.

Harapan ini nampaknya bagaikan mimpi di siang hari bolong. Yang terjadi bukannya konsolidasi demokrasi tetapi justru berkembang kearah apa yang disebut *frozen democracy* yang antara lain ditandai dengan berkembangnya konflik etnisitas, maraknya kekerasan politik secara kolektif, dan lokalitas politik yang berlebihan.

Masa transisi demokrasi menjadi titik krusial yang membuat kita semua menjadi masyarakat apa yang oleh Turner dinamakan sebagai "liminality", suatu masyarakat yang digambarkan "tidak berada di sana dan tidak pula berada di sini". Atau dengan bahasa sosiologis sebagai masyarakat yang "anomaly", suatu masyarakat yang tidak lagi punya pegangan nilai-nilai. Berkembangnya masyarakat liminalitas atau anomali di satu sisi karena mereka menjadi anti struktur, di sisi lain masyarakat tidak lagi dapat melihat dan menemukan keteladanan, panutan, atau pengalaman-pengalaman baik pada struktur politik maupun perilaku elite politik yang ada yang patut dijadikan acuan dalam kehidupan keseharian.

Dalam kondisi demikian kesediaan kita untuk menyerahkan semua proses politik pada suatu set prosedur-prosedur dan aturan-aturan main yang disepakati bersama menjadi cukup merepotkan. Lebih-lebih masyarakat banyak menyaksikan para elit politik main trabas dari aturan main dan prosedur yang disepakati bersama. Yang dapat kita saksikan kemudian adalah berbagai

Sejumlah ironi atau paradoks demokrasi yang menyembul di permukaan era reformasi ini menunjukkan, betapa terjal jalan yang ditempuh oleh bangsa ini menuju demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa, ternyata tidak mudah untuk mewujudkan demokrasi secara jujur, jernih dan bertanggung jawab, baik pada tingkat alam pikiran, lebih-lebih sebagai politik yang tersistem. Perjuangan demokrasi akhirnya harus berhadapan dengan godaan-godaan kekuasaan yang menina bobokkan di tengah sejumlah jerat politik yang anti demokrasi.

Fenomena Pilkada.

Dalam konteks kehidupan politik demokrasi, pemilu dan pilkada merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Pemilu terutama yang dilaksanakan pada tahun 2004 dan Pilkada langsung yang akan dimulai pada Juni 2005 untuk memilih Gubernur, Bupati atau Walikota mempunyai makna strategis, tidak saja karena sifatnya yang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, tetapi yang lebih penting adalah dengan pemilu 2004 dan Pilkada secara langsung itulah masa depan kepolitikan Indonesia dipertaruhkan.

Hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap periode menjelang pemilu dan pilkada situasi dan kondisi politik seringkali akan diwarnai dengan berbagai persaingan dan konflik antar kekuatan politik. Yang menjadi persoalan bagaimana kita dapat memenej dan mngendalikan persaingan dan kemungkinan konflik antar kekuatan politik sehingga tidak mencuatkan anarkhisme dan kekerasan politik ? Bisakah kita berharap pada aturan main pemilu dan pilkada sebagai tonggak sejarah pengembangan proses politik menuju transisi demokrasi ? Seberapa besar peluang untuk menggunakan pemilu dan pilkada sebagai wahana untuk mencegah kemungkinan reformasi berjalan mundur menuju kembalinya otoritarianisme system politik kita dalam bentuk yang baru oleh kekalahan gerakan reformasi dari kekuatan mereka yang mengendalikan senjata dan dari mereka yang menguasai sumber daya produktif masyarakat dan ekonomi kita ?

Lebih khusus, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan perlu memahami dengan baik kompetisi dan konflik politik sejak runtuhnya rezim Soeharto. Pemahaman itu pada gilirannya paling sedikit menuntut pemahaman lebih khusus

menumbuhkan rasa takut untuk untuk berbeda. Tumbuh ketakutan politik diam-diam disementara kalangan masyarakat, termasuk mereka yang kritis, hanya karena beda dengan kekuatan politik yang ada. Demokrasi nyaris tidak menjadi sebuah alam pikiran dan kearifan untuk toleran terhadap perbedaan. Gejala monopoli untuk menang sendiri mulai marak, bahkan sampai ke bentuk fisik, dengan menggunakan simbol-simbol milik partai, kendati harus memakai fasilitas publik yang sebenarnya pusparagam.

Kedua, berkembangnya konspirasi politik yang sangat pragmatis dengan mereka yang dulu anti demokrasi, yang diwarnai semangat kental hanya sekedar untuk meraih kemenangan Pemilu tanpa menunjukkan komitmen serius dalam mengagendakan demokrasi.

Ketiga, demokrasi mulai dimasukkan hanya sekedar sebagai retorika politik ketimbang sebuah agenda politik. Ketika keseragaman pada Orba dihujat habis-habisan, kini sebagian kekuatan demokratik mulai bersilat lidah bahwa demokrasi tidak harus selalu perbedaan tetapi juga kesamaan. Ketika pilihan tunggal ala Orba digugat tanpa ampun, kini tumbuh retorika bahwa pilihan tunggal itu juga demokratik. Kesan yang tumbuh ialah demokrasi bukan lagi sebagai idealisme dan agenda yang harus diperjuangkan sebagai pilihan politik untuk mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi lebih sebagai alat dan isu untuk meraih kekuasaan.

Keempat, ketika kultus individu yang diperagakan oleh rezim Soeharto dengan berbagai simbolnya dihujat keras untuk dihabisi diseluruh lini, kini sebgaiian masyarakat politik malahan mulai memperagakan simbolisasi-simbolisasi figur kepemimpinan yang membawa aroma kultus individu dalam bentuk lain. Simbol-simbol budaya politik Orba bahkan mulai dibangkitkan kembali, seakan merupakan potret kehidupan politik yang benar adanya.

Sentralisasi otoritas dengan mobilisasi simbol-simbol kharisma politik mulai dibangun, seakan mengesankan pada dunia bahwa telah lahir sebuah potensi kepemimpinan baru yang sangat layak untuk memimpin Indonesia kedepan. Tidak jadi soal apakah kharisma politik itu nyata atau semu, yang penting ada pesona yang ditawarkan sebagai komoditas politik.

negara. Sedangkan sebagai logika anti konsep, stabilitas nasional dikaitkan dengan masalah legitimasi dan banyak berfungsi untuk mendukung seni mengelola otoritas kekuasaan negara (Geertz, 1980). Yang terjadi kemudian adalah sentralisasi peran negara yang dipersonifikasikan lewat Soeharto, MPR, DPR, Pers, Partai Politik, Ormas dan hampir seluruh institusi sosial politik kenegaraan dipasung secara sistematis di bawah kendali negara dan ketiak Soeharto. Yang lahir dalam situasi seperti itu adalah demokrasi semu, demokrasi jadi-jadian. Paradoks demokrasi ini pada akhirnya juga runtuh pada 21 Mei 1998.

Era Reformasi

Reformasi yang gegap gempita memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan *booming* parpol baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya yang merupakan ciri-ciri demokrasi.

Namun, dibalik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, agaknya masih belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk menggelindingkan demokrasi. Sekalipun berbagai pranata bangunan demokrasi kini telah terbentuk, toh di sana sini masih banyak dijumpai paradoks demokrasi. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang prosedural kelembagaan ketimbang demokrasi yang mengacu pada tata nilai.

Berbagai paradoks yang masih berkembang di era reformasi sering membuat untuk berpikir ulang dan mengedepankan pertanyaan kritis. Apakah masa transisi akan bisa dilewati dengan baik sehingga terbentuk *consolidated democracy* atau kita gagal melalunya sehingga yang muncul adalah *consolidated anarchy* yang mengiringi kita kembali pada sistem otoritarian dan militeristik.

Menurut Pudjo Suharso (2002) setidaknya tercatat berbagai paradoks demokrasi yang patut dikritisi saat ini. *Pertama*, berkembangnya kekerasan politik, anarki, radikalisme, percekocan massal yang sering dilanjutkan dengan adu jotos secara kolektif, pemaksaan kehendak, dan berbagi perilaku menyimpang lain yang justru mencerminkan anti demokrasi. Syahwat politik *zero sum game* untuk menenggelamkan lawan politik menjadi panorama lazim yang

Masa Orba

Seiring dengan kegagalan pembumian demokrasi pada masa Orla, unsur-unsur “di luar” masyarakat secara perlahan tumbuh berkembang menjadi wahana tumbuhnya logika dan penjabaran baru budaya bangsa Indonesia. Pada masa Orba, diinterpretasikan, budaya politik haruslah memiliki logika dan dijabarkan sedemikian rupa dimana negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Logika penempatan negara sebagai aktor tunggal terartikulasi melalui pengesahan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara dengan seluruh perangkat birokrasi dan militer demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik.

Di sinilah kemudian terjadi proses penyingkiran corak egaliter dan demokratik dari budaya bangsa Indonesia dan kemudian digantikan dengan corak feodalistik yang dimungkinkan oleh dua hal pokok (**Pudjo Suharso,2002**). *Pertama*, melalui integrasi, pembersihan dan penyatuan birokrasi negara dan militer di bawah satu komando. Dari upaya ini, lantas membuka jalan lebar bagi penjabaran dan pemberian logika baru dalam feodalisme budaya bangsa Indonesia secara nyata dan operasional. Jabaran dan logika baru ini semakin menemukan momentumnya berkaitan dengan kenyataan di masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi sangat parah di satu pihak dan obsesi negara untuk membangun pertumbuhan ekonomi sebagai peletak dasar penghapusan kemiskinan di lain pihak.

Kedua, pengukuhan negara *qua* negara, juga dilakukan melalui upaya penyingkiran hiruk pikuk politik massa. Partisipasi politik yang terlalu luas dan tidak terkontrol, dianggap dapat membahayakan stabilitas politik yang merupakan *conditio sine qua non* bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Karena itu, keterlibatan negara melalui aparat birokrasi dan militer diabsahkan untuk menjangkau ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dari lokasi situasi ini, stabilitas pembangunan ekonomi lantas diidentikkan dengan stabilitas nasional. Perlahan-lahan konsep stabilitas nasional diperluas dimensinya menjadi logika anti-kritik dan anti konsep. Sebagai logika anti-kritik, stabilitas nasional dikaitkan dengan masalah-masalah *security* dan banyak berfungsi untuk membantu penyelenggaraan mekanisme kekuasaan

bentuk pilihan pada demokrasi liberal dan parlementer dan secara ekonomis dalam bentuk pilihan penciptaan kelas menengah pribumi yang kukuh (**Bulkin, 1984**). Obsesi dari pilihan politik dan ekonomi semacam ini adalah terbentuknya sistem ekonomi kapitalis yang mampu menopang tegaknya masyarakat berdaya (*civil society*). Jika hal ini bisa terwujud diharapkan demokrasi akan menampakan dirinya secara nyata.

Namun sayangnya, persyaratan duniawi yang hendak diwujudkan terutama kelas menengah yang kuat sebagai aktor sentral untuk menopang demokrasi setelah terbebas oleh hambatan struktural perekonomian saat itu tidak diketemukan. Pembangunan semesta yang dicanangkan Presiden Soekarno untuk mengubah perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional yang bercorak lebih sosialis terbukti gagal total, akibat ketiadaan topangan struktur politik yang mapan dan demokratis. Kelas menengah yang diharapkan akan lahir pun sulit diketemukan.

Kegagalan praktik pembedaan demokrasi liberal dan parlementer lalu direduksi sebagai kegagalan penerapan demokrasi ala Barat yang bertentangan dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia. (*Di bawah Bendera Revolusi II, 1965*). Sengaja diabaikan kenyataan bahwa kegagalan penerapan demokrasi ala Barat tersebut sesungguhnya lebih disebabkan oleh rapuhnya bangunan sistem politik yang berpijak pada pembelaan ideologis-kultural dan keroposnya sistem ekonomi saat itu.

Maka kemudian, Soekarno mencoba sistem Demokrasi Terpimpin, yang katanya menjadi demokrasi khas Indonesia. Sekalipun Soekarno mengatakan bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi, namun praktik yang meluas dalam kehidupan bangsa dan negara justru kekuasaan yang serba terpusat (*sentralistik*) pada diri Soekarno. Bung Karno selaku Presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan Konstituante, PSI, Masyumi dan meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti demokrasi itu akhirnya tumbang pada tahun 1965.

kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar berbasis pada nilai-nilai dan kaidah demokrasi dalam arti yang sebenar-benarnya.

Ketika era reformasi berkembang menyeruak tatanan kehidupan politik Indonesia, sebagian besar masyarakat berharap akan lahir tatanan dan sistem perpolitikan yang benar-benar demokratis. Namun, setelah hampir lima tahun berjalan, praktik-praktik politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis belum menampakkan arah yang pas. Demokrasi pun kemudian dipertanyakan dan digugat ketika sejumlah praktik politik yang mengatasnamakan demokrasi sering menunjukkan paradoks dan ironi.

Gugatan terhadap demokrasi ini sesungguhnya memiliki relevansi yang kuat dalam akar sejarah dan sosiologi politik bangsa Indonesia. Dalam konteks itulah, tulisan ini hendak melihat bagaimana perjalanan demokrasi di negeri ini yang kemudian dianalisis guna membaca prospek demokrasi Indonesia di masa depan dengan mengambil contoh kasus Pemilu dan Pilkada.

Paradoks Masa Orla

Persoalan di seputar demokrasi bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah dan dapat tumbuh dengan sendirinya dalam denyut nadi kehidupan bangsa. Tetapi seperti dikatakan **Apter (1963)**, persoalan demokrasi adalah semata-mata penciptaan manusia, yang di satu sisi mencerminkan keterbatasan dan keharmonisan obyektif di luar diri manusia.

Beranjak dari semangat dan kerangka proposisi di atas, maka melumernya corak demokratik dan egaliter—sebagai cita-cita sesungguhnya budaya Indonesia—sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Dapat diambil contoh kasus ketika terjadinya proses pemindah-alihan kekuasaan *beamtenstaal* Belanda dan diperlukan *fasisme* Jepang ke tangan Republik, ternyata justru tidak membawa perubahan yang berarti. (**Feith, 1971**). Perubahan-perubahan yang terjadi lebih banyak bergerak pada peringkat estesis-simbolik ketimbang etis-substantif. Semangat egaliteranisme dan budaya demokratik yang telah terpatri dalam angan-angan masyarakat sirna, setelah pernyataan kemerdekaan dicoba untuk diduniawikan secara politik dalam

Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No. 2, UNPAR, 2004.

DEMOKRASI INDONESIA : Dari Masa Ke Masa

Oleh : Hartuti Purnaweni¹

Aku mau
kamu mau
dia mau
yang kita mau
terjadi
tapi yang terjadi
tak diinginkan
oleh satu pun diantara kita
(Pudjo Suharso,2002).

Demokrasi adalah sebuah kata yang begitu sering diucapkan. Namun, makin banyak ia dibahas makin terasa betapa sulit mencari contoh tentang negara yang memenuhi tatanan kepolitikan demokrasi secara sempurna. Di Indonesia, pencarian terhadap sosok demokrasi pun terus digelar, baik pada aras implementasi sistem politik maupun kajian akademik. Dalam aras akademik, sejumlah makalah dikupas habi-habisan dalam berbagai seminar. Sejumlah buku, artikel pidato para pakar dan politisi, telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, koran dan majalah umum.

Tapi, berbeda dengan di negara-negara berkembang lainnya, semaraknya perbincangan tentang sistem demokrasi di Indonesia bukan karena bangsa atau pemerintahan dinegeri ini tidak mengenal sistem demokrasi. Justru sebaliknya, bangsa Indonesia pada aras implementasi sistem politik terlalu banyak memahami varian-varian demokrasi di dunia. Beberapa diantaranya bahkan telah diujicobakan dinegeri ini : Demokrasi Liberal, Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Pancasila. Namun semua varian demokrasi gagal memberikan tatanan

¹ Penulis adalah Dosen FISIP Undip Semarang